



Pemangkasan Anggaran tak Boleh Korbankan TPP Pegawai

Pemangkasan Anggaran tak Boleh Korbankan TPP Pegawai

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulsel memastikan adanya pemblokiran anggaran perjalanan dinas (Perdin) sebesar 50% sebagai langkah efisiensi anggaran. Pemangkasan itu berdampak pada Perdin OPD, terutama yang tidak memiliki output jelas.



INT.

▶ Ke Halaman 7

FADJRY DJUFRY

Pemangkasan Anggaran tak Boleh Korbankan TPP Pegawai

▶ dari Halaman 1

Pj Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, berharap, agar Perdin yang tidak mendesak dihindari dan mendorong penggunaan pertemuan virtual jika memungkinkan.

"Perjalanan dinas yang outputnya tidak jelas dan tidak ada yang dicapai sebaiknya

dihindari, kecuali pertemuan yang sifatnya mendesak," katanya, Selasa (11/2/2025).

Terkait Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Prof. Fadjry kembali menegaskan, bahwa hak pegawai harus tetap terjaga. Karena itu, dia berharap pembayaran TPP tidak mengalami keterlambatan dan tetap diberikan sesuai jadwal.

"TPP adalah hak dasar pegawai yang seharusnya tidak dipotong. Kami berharap gaji TPP tidak ditunda berbulan-bulan," pungkasnya.

Efisiensi anggaran ini juga, lanjut Prof. Fadjry, akan berdampak pada saat pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada 20 Februari mendatang. Ia juga menegaskan, hanya

gubernur yang akan diundang hadir dalam acara itu, sementara kepala OPD dilarang menggunakan anggaran APBD atau APBN untuk Perdin.

"Jika ada yang ingin pergi karena urusan keluarga dan menggunakan biaya sendiri, silakan. Asalkan tidak mengganggu tanggungjawab mereka," terangnya. (eky/rif)